



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Penyuluh KUA Sinjai Timur, tempat kediaman di Dusun Bentengge, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bentengge, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 5 April 2018 mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Sj, tanggal 5 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2018/PA.Sj



1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Keningau, Sabah, Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Agus (saudara kandung Pemohon II), dinikahkan oleh Lewonamang (imam Keningau), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Ahmad dan Agus dengan mas kawin berupa emas 5 (lima) gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Ayu Al Muawwazah binti Muh. Taqwa, lahir pada tanggal 28 November 1999;
 - b. Khaerul Ikhwan bin Muh. Taqwa. lahir pada tanggal 10 Oktober 2002;
 - c. Muh. Azmi bin Muh. Taqwa, lahir pada tanggal 5 September 2004;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Keningau, Sabah, Malaysia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan pengurusan akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2018/PA.Sj



7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Februari 1999;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 1999;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan pandangan dan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Syahrir bin Muh. Tahir, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Baccara, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena paman dan tante saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Februari 1999, dan saksi hadir pada waktu pernikahannya di Keningau, Sabah, Malaysia;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Agus karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikah adalah Ahmad dan Agus, dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas 5 (lima) gram;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II masih gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan sejak masih kecil;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan akta nikah pada saat menikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pernikahannya untuk kepastian hukum perkawinannya serta untuk kepentingan hukum yang lainnya;
2. H. Anwar, S. Pd bin M. Arsyad, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru SD Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, tempat kediaman di Dusun Pasaka, Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2018/PA.Sj



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahannya, namun saksi tahu karena pada tanggal 13 Februari 1999, 3 (tiga) hari sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi ditelepon oleh Pemohon I bahwa akan menikah dan juga saksi di beritahu tentang pernikahannya yaitu akan pada tanggal 16 Februari 1999 di Keningau, Sabah, Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Keningau, dan yang bertindak sebagai wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Agus karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikah adalah Ahmad dan Agus, dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas 5 (lima) gram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II masih gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan sejak masih kecil;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan akta nikah pada saat menikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pernikahannya untuk kepastian hukum perkawinannya serta untuk kepentingan hukum yang lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2018/PA.Sj



keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Keningau, Sabah, Malaysia, pada tanggal 16 Februari 1999, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat sehingga tidak mempunyai Akta Nikah, dan Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan pernikahannya untuk kepastian hukum atas perkawinannya serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2018/PA.Sj



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan seorang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Februari 1999 di Keningau, Sabah, Malaysia;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung setempat bernama Lewonamang;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Agus, saudara kandung Pemohon II, dengan di saksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ahmad dan Agus, dan maharnya berupa cincin emas 5 (lima) gram;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan juga sesusuan sejak masih kecil;
5. Bahwa hingga kini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat;
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak mendapatkan akta nikah karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2018/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Keningau, Sabah, Malaysia, pada tanggal 16 Februari 1999 sesuai dengan syari'at Islam, namun pernikahannya tersebut tidak tercatat karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak memiliki Akta Nikah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai, hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada 16 Februari 1999, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti perkawinannya agar mendapatkan kepastian hukum, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2018/PA.Sj



Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.*

2. Kitab Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, dan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, oleh karena demi melindungi hak-hak dasar anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang berlangsung pada tanggal 16 Februari 1999 di Keningau, Sabah, Malaysia, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 1999 di Keningau, Sabah, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1439 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S. HI.** dan **Syahrudin, S. HI. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Nur Afidah.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S. HI.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.



ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nur Afidah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 140.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Penetapan tersebut sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S. Ag., M.H.